

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2017-2022, RKT Tahun 2019, Renja Tahun 2019, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

**Tabel. 3.1**  
**Predikat Nilai Capaian Kinerja**

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai**

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

### **3.1 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan

demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor : 188.4/43/Diskominfo Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2022.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	Persen	68,00	64,615	95,02
2	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala	Persentase jumlah informasi public berkualitas terpublikasikan	Persen	100	100	100
3	Meningkatnya Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis	Nilai	1,5	1,94	129

berbasis elektronik (e-Government)	Elektronik)				
------------------------------------	-------------	--	--	--	--

*Keterangan:*

*Penjelasan tabel dapat dilihat pada lampiran II.*

Berdasarkan tabel diatas, tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

**Tabel 3.1.2**  
**Capaian IKU Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Berdasarkan Persentase**  
**Tahun 2019**

<b>Persentase</b>	<b>Predikat</b>	<b>Jumlah Indikator</b>
<b>&lt;100</b>	Tidak Tercapai	1
<b>= 100</b>	Tercapai/sesuai target	1
<b>&gt; 100</b>	Melebihi target	1

Berdasarkan tabel diatas diketahui:

1. 1 (satu) indikator tidak tercapai (100%)
2. 1 (dua) indikator sesuai target (100%).
3. 1 (satu) indikator melampaui target (lebih dari 100%)

Capaian indikator berdasarkan klasifikasi kategori dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1.3**  
**Capaian IKU Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Berdasarkan Kategori**  
**Tahun 2019**

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	3
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Hasil pengukuran berdasarkan Sasaran Utama Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

-

**Tabel 3.1.4**  
**Capaian Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Tahun 2019**

Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Sasaran	Predikat
<b>Sasaran Strategis 1</b>	1	95,02	Tidak Tercapai
<b>Sasaran Strategis 2</b>	1	100	Tercapai / Sesuai Target
<b>Sasaran Strategis 3</b>	1	129,33	Melebihi Target

tabel diatas diketahui bahwa terdapat:

1. 1 (satu) sasaran stragegis Tidak Tercapai
2. 1 (satu) sasaran strategis melebihi target;
3. 2 (dua) sasaran strategis sesuai target

**Tabel 3.1.5**  
**Capaian Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Berdasarkan Kategori Tahun 2019**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	0 - 49,99 Sangat kurang	50 - 64,99 Kurang	65 - 74,99 Cukup	75 - 89,99 Baik	> 90 sangat baik
1.	Sasaran 1	1	95,02	-	-	-	-	Sangat Baik
2.	Sasaran 2	1	100					Sangat Baik
3.	Sasaran 3	1	129,33					Sangat baik

**Tabel 3.1.6**  
**Pencapaian Target Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan**  
**Informatika Tahun 2019**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Tingkat Pencapaian					
				Melebihi target (>100)		Sesuai target (=100)		Dibawah target (<100)	
				Jlh	%	Jlh	%	Jlh	%
1.	Sasaran Strategis 1	1	95,02	-	-	1	100	1	95,02
2.	Sasaran Strategis 2	1	100	....	....	1	100	....	....
3.	Sasaran Strategis 3	1	129,33	1	129,33	....	....	....	....

Berdasarkan tabel diatas, capaian target sasaran strategis Dinas Komuniaksi dan Informatika Tahun 2019 masuk dalam kategori sangat baik.

### 3.2 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Sesuai ketentuan tersebut, Pelaporan Kinerja ini dibuat berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan berdasarkan Keputusan 188.4/16/Diskominfo Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika dan Rencana Sasaran Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/246/KUM/2018 Tanggal 4 Juni 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis 2017-2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala telah ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) , dengan rincian sebagai berikut:

#### **SASARAN STRATEGIS 1**

***Meningkatnya Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala***

Sasaran ***“Meningkatnya Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala”*** merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian **Misi 1 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala *“Mengintegrasikan Infrastruktur***

***wilayah yang mendukung kemandirian desa dan penataan kota*** pada Sasaran ***“Meningkatnya Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala”***, dengan indikator ***“Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala”***.

Untuk upaya pencapaian sasaran ini Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan indikator ***“Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala”***.

***“Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala”***. dengan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{jumlah desa mendapatkan layanan telekomunikasi}}{\text{jumlah seluruh desa}} \times 100$$

**Capaian kinerjanya dapat dijabarkan sebagai berikut:**

#### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2019.**

Indikator Kinerja Utama ***“Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala”*** berdasarkan Renstra 2017-2022, tahun 2019 ditargetkan 68,00%, dengan realisasi 64,615% dimana untuk tahun 2019 ada usulan pembangunan menara sebanyak 8 (delapan) lokasi Desa Terantang Kec. Mandastana, Desa Banitan Kecamatan Bakumpai, Desa Karya Indah Kecamatan Tabukan, Desa Asia Baru Kecamatan Kuripan , Desa Sekata Baru Kecamatan Tamban, Desa Simpang Nungki Kecamatan Cerbon, Desa Rantau Bamban Kecamatan Tabukan dan

Desa Tanjung Harapan Kecamatan Alalak. Maka capaian kinerja untuk indikator kinerja utama adalah 64,615% (126 desa/195 desa x100)

**Tabel 3.2.1**  
**Perbandingan Target dan Realisasi IKU**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Meningkatkan Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	68,00	64,615	95,02

*Keterangan :*

*Sesuai dengan Perda No. 4 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pengendalian menara telekomunikasi dimana layanan penataan dan pengendalian telekomunikasi tercapai untuk pembangunan menara baru*

## **2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu/Kondisi Awal Renstra.**

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 dibanding dengan kondisi awal Renstra, dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Kondisi awal Renstra	%
1	Meningkatkan Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten	65,00	64,615	63,00	97,50

	Barito Kuala	Barito Kuala				
--	--------------	--------------	--	--	--	--

*Keterangan :*

*Pada kondisi awal renstra target 123 desa yang terlayani jaringan telekomunikasi, untuk target tahun 2019 ada 126 desa yang terlayani jaringan telekomunikasi dimana untuk setiap tahunnya diusulkan minimal untuk 5 (lima) menara baru.*

### **3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2019-2022**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019 dan Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.2**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika 2019-2022**

No	Indikator Kinerja Utam	Awal Renstra	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap (2022)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	63,00	68,00	64,615	95,02	75,00	86,15

*Keterangan :*

*Pada kondisi awal renstra target 123 desa yang terlayani jaringan telekomunikasi, tahun 2019 ditargetkan 126 yang terlayani jaringan*

telekomunikasi dengan usulan 8 (delapan) menara baru di delapan desa pada tujuh kecamatan dimana untuk setiap tahunnya di targetkan layanan untuk 5 (lima) menara baru sampai dengan target akhir rentsra

**4. Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama.**

Relisasi capaian kinerja tahun 2019 tidak memenuhi target disebabkan quota menara yang akan dibangun memprioritaskan daerah 3T (terluar, terdepan dan tertinggal) sehingga usulan Kabupaten Barito Kuala masih dipertimbangkan.

**5. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama.**

Untuk pemberdayaan sumber daya manusia, harus mengetahui tentang regulasi (peraturan, kebijakan dan SOP) yang berlaku.

Untuk mendukung pencapaian target persentase cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala, dialokasikan dana dalam DPA Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019 sebesar Rp. 78.850.000,- terealisasi sebesar Rp. 56.827.696,- atau mencapai 64,16% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 35,84%.

**Tabel 3.2.3**

**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019**

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
---------	-------------------	---------------------------	-----------------------	-------------------

Meningkatkan Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	97,02	64,16	35,84
---	---	-------	-------	-------

## 6. Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran.

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala” dengan indikator kinerja Utama “Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala”, untuk tahun 2019 untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran dengan rekening program Pengembangan Fasilitas Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO) kegiatan Penyediaan infrastruktur telekomunikasi di wilayah KPU/USO, Pembinaan , pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dan Pembinaan dan pengembangan desa broadband (internet desa)

### **SASARAN STRATEGIS 2**

***Meningkatnya pengelolaan informasi komunikasi Publik pemerintah Kabupaten Barito Kuala***

Sasaran ***“Meningkatnya pengelolaan informasi komunikasi Publik Pemerintah Kabubapten Barito Kuala”*** merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian **Misi 2 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani”** pada Sasaran ***“Meningkatnya pengelolaan informasi komunikasi Publik***

**pemerintah Kabubapten Barito Kuala.”, dengan indikator “Persentase Jumlah Informasi Publik Berkualitas Terpublikasikan”.**

Untuk upaya pencapaian sasaran ini Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan indikator **“Persentase Jumlah Informasi Publik Berkualitas Terpublikasikan”.**

**“Persentase Jumlah Informasi Publik Berkualitas Terpublikasikan”.** Sesuai dengan amanat Undang – undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2018, maka semua lembaga public wajib untuk memberikan informasi seluas –luasnya kepada masyarakat, kecuali informasi yang diperkecualikan. Untuk itu SKPD sebagai lembaga Publik wajib memberikan informasi seluas –luasnya kepada masyarakat. Selain itu juga keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, jika tidak terpublikasikan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat maka akan menjadi kurang berkesan bagi masyarakat dan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. dengan formulasi perhitungan:

$$\frac{\text{jumlah informasi yang disebarluaskan selama 1 tahun}}{\text{jumlah informasi yang ditarget}} \times 100$$

**Capaian kinerjanya dapat dijabarkan sebagai berikut:**

### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2019.**

Indikator Kinerja Utama “**Persentase Jumlah Informasi Publik Berkualitas Terpublikasikan**” berdasarkan Renstra 2017-2022, tahun 2019 ditargetkan 100%, dengan realisasi 100% dimana setiap ada kegiatan kepala daerah atau SKPD Se Kabupaten Barito Kuala, Tim Website Daerah selalu mendokumentasikan dan mempublikasikannya melalui website daerah secara terus menerus setiap ada kegiatan/even kepala daerah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selalu dipublikasikan kepada masyarakat melalui website daerah setiap hari. Berita yang diinformasikan dalam satu hari bisa 1 sampai dengan 2 berita/informasi sehingga dalam satu tahun ada 305 informasi yang dipublikasikan. Maka capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Utama ini adalah 100% (305 informasi/305 informasi X100).

**Tabel 3.2.4**  
**Perbandingan Target dan Realisasi IKU**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya pengelolaan informasi komunikasi public pemerintah daerah	Persentase jumlah informasi public berkualitas terpublikasikan	100	100	100

*Keterangan :*

*Informasi publik berkualitas dalam artian telah memiliki SOP Nomor 188.45/487/KUM/2017, adanya SK Bupati Barito Kuala Nomor : No. 188.45/120/KUM/2019 tentang tanggal 27 Pebruari 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pegelolaan website daerah dan integrasi data kabupatem Barito Kuala Tahun Anggaran 2019.*

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu/Kondisi Awal Renstra.

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Jumlah Informasi Publik Berkualitas Terpublikasikan tahun 2019 dibanding dengan kondisi awal Renstra, dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Kondisi awal Renstra	%
1	Meningkatnya pengelolaan informasi komunikasi public pemerintah daerah	Persentase jumlah informasi public berkualitas terpublikasikan	100	100	100	100

*Keterangan :*

*Pada kondisi awal renstra 254 informasi, untuk target tahun 2019 ada 305 informasi yang disebarluaskan bisa dalam bentuk berita, data (dokumen SAKIP , dokumen LAKIP, dokumen Statistik, Laporan Keuangan) dan dokumen Peraturan ( Perda, Perbub dan SK)*

## 3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2019-2022

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019 dan Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.5**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika 2019-2022**

No	Indikator Kinerja Utam	Awal Renstra	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap (2022)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Persentase jumlah informasi public berkualitas terpublikasikan	100	100	100	100	100	100

*Keterangan :*

*Untuk target awal renstra 254 informasi. Tahun 2019 ditargetkan 305 informasi dengan realisasi 305 informasi atau mencapai 100%. Dan untuk target akhir renstra 320 informasi.*

#### **4. Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama.**

Realisasi capain kinerja tahun 2019 telah sesuai dengan target capaian. Hal ini disebabkan oleh dukungan dan partisipasi Tim Website Daerah dan seluruh ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala dalam mengelola website daerah dan mempublikasikan setiap kegiatan pimpinan daerah atau SKPD di Kabupaten Barito Kuala. Kegiatan penyebarluasan informasi tersebut dilakukan melalui media website daerah, media social, leaflet, stiker, baliho dan spanduk.

Beberapa permasalahan yang terjadi dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kurang maksimalnya memperoleh data / informasi untuk mengisi konten website PPID Kab/Utama dari setiap SKPD untuk itu diharapkan PPID pembantu proaktif menyediakan data/informasi untuk mengisi konten website PPID utama
2. Masih kurangnya SDM ASN untuk mengelola/menangani website sehingga perlu adanya penambahan SDM ASN untuk mengelola website .

#### **5. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama.**

Tim Pengelolaan website daerah Kabupaten Barito Kuala terdiri dari 19 orang anggota tim dari lintas sektor SKPD yang berasal dari Sekretariat Daerah, Bappelitbang, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Disdukcapil, Inspektorat dan DTMPTSP untuk pengelolaan website dan integritas data.

Untuk mendukung pencapaian target Persentase jumlah informasi public berkualitas terpublikasikan didukung oleh program dialokasikan dana dalam DPA Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019 sebesar Rp. 1.233.303.350,- terealisasi sebesar Rp. 1.141.534.674 atau mencapai 92,56% sehingga tingkat efesiensinya sebesar 7,44%.

**Tabel 3.2.6**

**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama  
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019**

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ( $\geq 100\%$ )	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya pengelolaan informasi komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase jumlah informasi publik berkualitas terpublikasikan	100	92,56	7,44

#### 4. Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran.

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya pengelolaan informasi komunikasi public pemerintah daerah” dengan indikator kinerja Utama “Persentase jumlah informasi berkualitas terpublikasikan”, dituangkan dalam Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah, Program Persandian untuk Pengamanan Informasi, Program Pengelolaan Informasi Publik dan Program Pengelolaan Komunikasi yaitu:

- a. Melakukan kegiatan pengelolaan tim website di Kabupaten Barito Kuala yang dilaksanakan selama 1 Tahun Anggaran yang mencakup 19 orang Tim Website sesuai dengan Sk. Bupati Barito Kuala No. 188.45/120/KUM/2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Website Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019 tanggal 27 Februari 2019.
- b. Mendokumentasikan dan mempublikasikannya melalui website daerah secara terus menerus setiap ada kegiatan/even kepala daerah di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan selalu dipublikasikan kepada masyarakat melalui website daerah setiap hari.

Contoh informasi yang telah dipublikasikan sebagai mana terlampir

### **SASARAN STRATEGIS 3**

***Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government)***

Sasaran ***“Meningkatnya Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik(e-government)”*** merupakan bagian dari pengimplementasian dalam pencapaian **Misi 2 RPJMD Pemerintah Kabupaten Barito Kuala “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani”** pada Sasaran ***“Meningkatnya Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik(e-government)”***, dengan indikator ***“Indek SPBE (Sistm Pemrintahan Berbasis Elektronik.***

Untuk upaya pencapaian sasaran ini Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan indikator ***“Indek SPBE (Sistm Pemrintahan Berbasis Elektronik ”.***

***“Indek SPBE (Sistm Pemrintahan Berbasis Elektronik ”.***

Dalam usaha untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih maka penerapan pemerintahan yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) atau yang lebih dikenal dengan e-government menjadi sangat penting. Perkembangan TIK saat ini sangat berpengaruh pada penerapan e-government di Kabupaten Barito Kuala

Keberhasilan penerapan e-government tidak hanya bergantung pada pembangunan sarana dan prasaran jaringan komunikasi saja namun

bagimanan perangkat tersebut benar- benar dapat digunakan secara efektif dan efesien, dengan formulasi perhitungan:

**Tingkat kematangan (Maturity) penerapan pemerintahan berbasis elektronik, sesuai dengan Permenpan RB No. 5 Tahun 2018.**

**Capaian kinerjanya dapat dijabarkan sebagai berikut:**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2019.**

Indikator Kinerja Utama “**Indek SPBE (Sistm Pemrintahan Berbasis Elektronik** ” berdasarkan Renstra 2017-2022, tahun 2019 ditargetkan 1,5, dengan realisasi 1,94 atau tercapai 129,33%. **nilai indek SPBE merupakan penjumlahan dari setiap indikator yang dihitung dengan mengalikan antara nilai tingkat kematangan dan bobot dari indikator tersebut.** Penilaian ini berdasarkan Self Assesment sesuai Permenpan No.5 Tahun 2018 tentang pedoman evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE). Pengukuran indek SPBE berdasarkan dari tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut :

1. Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu)
2. Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua)
3. Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga)
4. Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat)
5. Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima)

**Tabel 3.2.7**  
**Metode Pembobotan**

<b>Domain dan Aspek Penilaian</b>	<b>Indikator</b>	<b>Total Bobot</b>
<b>Domain 1 – Kebijakan SPBE</b>	<b>17</b>	<b>17%</b>
Aspek 1 – Kebijakan Tata Kelola SPBE	7	7%
Aspek 2 – Kebijakan Layanan SPBE	10	10%
<b>Domain 2 – Tata Kelola SPBE</b>	<b>7</b>	<b>28%</b>
Aspek 3 – Kelembagaan	2	8%
Aspek 4 – Strategi dan Perencanaan	2	8%
Aspek 5–Teknologi Informasi dan Komunikasi	3	12%
<b>Domain 3 - Layanan SPBE</b>	<b>10</b>	<b>55</b>
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	7	35%
Aspek 7 – Layanan Publik berbasis Elektronik	3	20%

Capaian indek SPBE untuk Tahun 2019 dapat ditunjukkan pada table berikut ini :

**Tabel 3.2.8**  
**Capaian Indeks SPBE Tahun 2019**

<b>Indek SPBE</b>	<b>1,94</b>
Domian	Indek
Kebijakan	1,35
Tata Kelola	1,57
Layanan	2,3

Indek SPBE untuk tahun 2019 realisasi 1,94 dari target 1,5 didukung oleh :

1. Domain kebijakan SPBE yaitu kebijakan yang terkait pelaksanaan SPBE yang mempunyai kekuatan yang mengikat aparatur di instansi pusat/pemerintah daerah masing-masing. Domain kebijakan internal SPBE dengan nilai 1,35 (**nilai rata-rata tingkat kematangan dari semua indikator pada domain.**) yang mencakup 2 aspek yaitu aspek kebijakan Tata kelola SPBE nilai 1,00 (**nilai rata-rata tingkat kematangan dari semua indikator pada aspek tersebut**) dan Aspek kebijakan layanan SPBE nilai 1,6 (**nilai rata-rata tingkat kematangan dari semua indikator pada aspek tersebut**) Aspek Indek domain kebijakan dapat ditunjukkan pada table berikut ini :

**Tabel.3.2.9**  
**Aspek Indek Domain Kebijakan**

<b>Indek Domain Kebijakan</b>	<b>1,35</b>
Aspek	Indek
Kebijakan Tata Kelola SPBE	1,00
Kebijakan Layanan SPBE	1,6

2. Domain Tata kelola yaitu kerangka kerja yang mengatur , mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan SPBE secara terpadu. Domain tata kelola dengan nilai 0,71 (**nilai rata-rata tingkat kematangan dari semua indikator**) . Ada 3 aspek yaitu aspek kelembagaan nilai 1,00 (**nilai rata-rata tingkat kematangan dari semua indikator pada aspek tersebut**), aspek strategi dan perencanaan nilai 2,5 (**nilai rata-rata tingkat**

*kematangan dari semua indikator pada aspek tersebut)* serta aspek TIK nilai 1,33 (*nilai rata-rata tingkat kematangan dari semua indikator pada aspek tersebut*) Aspek Indek domain tata kelola dapat ditunjukkan pada table berikut ini :

**Tabel.3.2.10**  
**Aspek Indek Tata Kelola**

<b>Indek Domain Tata Kelola</b>	<b>1,57</b>
Aspek	Indek
Kelembagaan	1,00
Strategi dan perencanaan	2,5
TIK	1,33

3. Domain Layanan yaitu fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE. Domain layanan dengan nilai 2,3 (*nilai rata-rata tingkat kematangan dari semua indikator*) mencakup 2 aspek yaitu aspek layanan administrasi pemerintahan nilai 2,57 (*nilai rata-rata tingkat kematangan dari semua indikator pada aspek tersebut*) dan aspek layanan publik nilai 1,83 (*nilai rata-rata tingkat kematangan dari semua indikator pada aspek tersebut*). Aspek Indek domain layanan dapat ditunjukkan pada table berikut ini :

**Tabel.3.2.11**  
**Aspek Indek Layanan**

<b>Indek Domain Layanan</b>	<b>2,3</b>
-----------------------------	------------

Aspek	Indek
Administasi pemerintahan	2,57
Layanan public	1,83

Maka capaian Kinerja untuk Indikator Kinerja Utama Indek SPBE (Sistm Pemrintahan Berbasis Elektronik ini adalah 129,33% (1,94/1,5 X100).

**Tabel 3.2.12**  
**Perbandingan Target dan Realisasi IKU**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik(e-government)	Indek SPBE (IStem Pemrinthan berbasis elektronik)	1,5	1,94	129

**2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu/Kondisi Awal Renstra.**

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Indek SPBE (Sistem pemerintahan berbasis elektronik) tahun 2019 dibanding dengan kondisi awal Renstra, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.13**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Kondisi Awal**  
**Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika**  
**Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Kondisi awal Renstra	%
1	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government)	Indek SPBE (Sistem pemerintahan berbasis elektronik)	1,34	1,94	-	-

*Keterangan ;*

*Pada tahun 2018 adalah tahun awal pelaksanaan Indek SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang sebelumnya adalah Pemeringkatan E-Government Indonesia (PeGI), Untuk tahun 2019 pelaksanaan indek SPBE ditargetkan 1,5 dengan realisasi untuk tahun 2019 adalah 1,94*

### **3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2019-2022**

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019 dan Sasaran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2017-2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2.14**  
**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika 2019-2022**

No	Indikator Kinerja Utam	Awal Renstra	2019			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2019 terhadap (2022)
			Target	Realiasasi	% Realiasasi		
1	Indek SPBE (Sistem pemerintahan	-	1,5	1,94	129	3	64,67

#### **4. Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama.**

Realisasi capain kinerja tahun 2019 telah melebihi target capaian. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa indikator yang telah memenuhi terutama indikator kebijakan tata kelola dan layanan dimana aplikasi yang digunakan disertai peraturan/kebijakan internal tata kelola SPBE contohnya SK, Peraturan Bupati dan MOU. MOU digunakan untuk aplikasi umum berbagi pakai seperti Simda, Manajemen Kepegawaian, Manajemen Penganggaran, Layanan Pengaduan Publik dan Renduk SPBE Pemerintah Daerah

Beberapa permasalahan yang terjadi dan solusi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai indek tata kelola TIK masih rendah sehingga perlu dipercepatan persiapan regulasi
2. Regulasi ( Peraturan , Kebijakan, SOP dan lain-lain) sehingga perlu dibentuknya Tim pengarah TIK
3. Kelembagaan (fungsi kelembagaan masih tumpang tindih) Perlu adanya review SOTK
4. Renduk SPBE belum terealisasi sesuai tahapan sehingga perlu adanya dukungan dan partisipasi semua pihak yang terkait.
5. Kurannya kebijakan internal yang mendukung implementasi contohnya kita menggunakan satu aplikasi tetapi belum ada produk hukum (Perda, Perbut dan SK)

## **5. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk Pencapaian Indikator Kinerja Utama.**

Jumlah personil ASN yang melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung indek SPBE berjumlah 4 orang dan dibantu oleh beberapa Tim Teknis.

Untuk mendukung pencapaian target Indek SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik) dialokasikan dana dalam DPA Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2019 sebesar Rp. 2.659.177.040,- terealisasi sebesar Rp. 2.592.955.921,- atau mencapai 97,51% sehingga tingkat efisiensinya sebesar 2,46%.

**Tabel 3.2.15**  
**Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Untuk pencapaian**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019**

<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>% Capaian Kinerja (≥100%)</b>	<b>% Penyerapan Anggaran</b>	<b>Tingkat Efisiensi</b>
Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government)	Indek SPBE (Sitem pemerintahan berbasis elektronik)	129	97,51	2,49

## **4. Program/Kegiatan yang Menunjang Untuk Pencapaian Kinerja Sasaran.**

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government)”

” dengan indikator kinerja Utama “Indek SPBE (Sistem Pemerintahan berbasis elektronik”, dituangkan dalam Program Pengembangan Infrastruktur TIK, Program Pengembangan Aplikasi dan Sistem Informasi dan Pengembangan Ekosistem dan Tata Kelola TIK

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Dari total keseluruhan anggaran Belanja Langsung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala tahun 2019 sebesar Rp. 4.867.376.848,- (*empat milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah*) dapat terealisasi sebesar Rp. 4.671.460.713,- (*empat milyar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah*) atau mencapai 92,12%. Sedangkan anggaran pada program bidang komunikasi dan informatika (sesuai dengan perjanjian kinerja) sebesar Rp. 3.971.330.390,- dapat terealisasi sebesar Rp. 3.791.318.291,- atau mencapai 95,47%.

Pada sasaran ke -1, Meningkatnya Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala dari anggaran Rp. 78.850.000,- dapat terealisasi sebesar Rp. 56.827.696,- atau mencapai 64,16%. Pada sasaran ke -2, Meningkatkan pengelolaan informasi komunikasi publik pemerintah daerah dari anggaran Rp. 1.233.303.350,- dapat terealisasi sebesar Rp. 1.141.534.674,- atau mencapai 92,56%. sedangkan untuk sasaran ke -3, Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik (e-government) dari anggaran Rp. 2.659.177.040,- dapat terealisasi sebesar Rp. 2.592.955.958,- atau mencapai 97,51%.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :



**TABEL 3.2.16**  
**REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN**

No	Sasaran	Indikator sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	% Realisasi		Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	Persentase Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala	68	64,615	95,02	Program Pengembangan Fasilitas Kewajiban Pelayanan Universal/Universal Service Obligation (KPU/USO)	78.850.000,-	56.827.696,-	64,16
2	Meningkatkan pengelolaan informasi komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase jumlah informasi public berkualitas terpublikasikan	100	100	100	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	49.186.000,-	47.000.786,-	95,56
						Program Persandian untuk Pengamanan Informassi	53.774.400,-	41.407.650,-	77,00
						Program Pengelolaan Infromasi Publik	999.512.950,-	932.695.703,-	94,49
						Program Pengelolaan Komunikasi Publik	130.830.000,-	120.430.535,-	89,85
3	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah berbasis elektronik (e-government)	Indek SPBE (sistem pemerintahan berbasis elektronik)	1,5	1,94	129	Program Pengembangan Infrastruktur TIK	2.131.057.040,-	2.109.175.589,-	99,13
						Program Pengembangan Aplikasi dan Sitem Informasi	414.750.000,-	374.585,220,-	92,86
						Program Pengembangan Ekositemdan Tata Kelola E-government	113.370.000,-	109.195.112,-	96,71







